

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengadaan Papan Informasi sebagai Media Komunikasi dan Penyebaran Informasi Dusun

Indriani Rukmimto^{1)*}, Okta Taufik Ramadhani²⁾, Fadilah Muhsen³⁾, Maimunah⁴⁾, Desi Ratnasari⁵⁾,
Muh. Irfan⁶⁾, Ardiansyah⁷⁾

^{1,2,3,4,5,6,7} STKIP Al Amin Dompu, Dompu

Email corresponding author*: indrianirukmimto@gmail.com

Abstrak

Informasi tentang wilayah dusun, seperti batas RT dan RW, nama gang, serta letak fasilitas umum, di banyak desa hanya diketahui oleh warga setempat dan tokoh masyarakat. Akibatnya, pendatang, tamu, dan petugas layanan sering kesulitan menemukan lokasi yang dituju. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi wilayah melalui pengadaan papan informasi di seluruh dusun di Desa Karama, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Papan informasi yang dibuat meliputi papan nama dusun, papan penunjuk RT dan RW, papan nama gang atau jalan, papan arah fasilitas umum, dan papan pengumuman. Kegiatan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan melibatkan pemerintah desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan karang taruna desa sebagai mitra utama. Tahapan meliputi pemetaan kebutuhan, perencanaan bersama, pembuatan dan pemasangan papan, pelatihan pengelola, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa papan informasi mempermudah pendatang dan petugas menemukan lokasi, memperluas jangkauan informasi kepada warga, dan menumbuhkan peran karang taruna sebagai pengelola dan pemelihara. Program ini memperlihatkan bahwa media sederhana dapat menjadi sarana pemberdayaan apabila dirancang dan dikelola bersama masyarakat.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Papan Informasi, KKN, Karang Taruna, Komunikasi.

Abstract

Information about hamlet territories, such as RT and RW boundaries, alley names, and the location of public facilities, is often known only to local residents and community leaders. As a result, newcomers, guests, and service officers frequently have difficulty finding their destinations. This Community Service Program (KKN) aimed to improve communication and the dissemination of territorial information through the provision of information boards in all hamlets of Karama Village, Kilo Subdistrict, Dompu Regency, West Nusa Tenggara. The boards include hamlet name signs, RT and RW signs, alley or street name signs, direction signs to public facilities, and announcement boards. The program applied a *Participatory Action Research* (PAR) approach involving the village government, hamlet heads, community leaders, and the village youth organization (Karang Taruna) as key partners. The results show that the boards helped newcomers and officers find locations, widened the reach of information to residents, and strengthened the role of Karang Taruna as managers and maintainers. The program demonstrates that simple media can empower communities when designed and managed together with them.

Keywords: Community Empowerment, Information Board, Community Service Program, Karang Taruna, Communication.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan yang terbagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil, yakni dusun, rukun warga (RW), dan rukun tetangga (RT). Bagi warga yang tinggal di dalamnya, pembagian wilayah tersebut sudah menjadi pengetahuan sehari-hari. Namun, bagi orang yang bukan warga setempat, seperti tamu, pendatang, kurir, petugas kesehatan, petugas penyalur bantuan, dan aparat yang bertugas, batas dusun, RT, dan RW serta nama-nama gang sering tidak diketahui karena tidak ada tanda yang menunjukkannya. Pada kondisi seperti itu, informasi wilayah hanya berada pada ingatan warga dan tokoh masyarakat, sehingga orang luar harus bertanya berulang kali untuk menemukan alamat yang dituju. Kejelasan identitas wilayah tidak hanya berkaitan dengan kemudahan menemukan lokasi, tetapi juga dengan ketertiban administrasi dan tata kelola desa. Penataan identitas wilayah, seperti penamaan gang, dilaporkan mendukung ketertiban administrasi dan akses informasi di Desa Parit Setia (Saherimiko et al., 2026).

Persoalan ini juga menyangkut pelayanan publik. Alamat yang tidak jelas dapat menghambat penyaluran bantuan, layanan kesehatan, pengiriman barang, hingga penanganan keadaan darurat. Di sisi lain, penyampaian pengumuman dari pemerintah desa, RT, dan RW kepada warga di setiap dusun masih bergantung pada penyampaian lisan atau pesan berantai sehingga tidak selalu sampai secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan penanda wilayah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Upaya tersebut tidak dapat sepenuhnya bergantung pada teknologi digital, karena transformasi digital dalam peningkatan pelayanan publik pemerintah desa di Indonesia dilaporkan berjalan lambat akibat berbagai faktor. Karena itu, sarana sederhana yang tidak bergantung pada perangkat dan jaringan internet tetap dibutuhkan untuk menjembatani kebutuhan informasi warga (Faozanudin et al., 2025).

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam penguatan tata kelola desa. Warga yang dilibatkan sejak perencanaan umumnya memiliki rasa memiliki terhadap hasil kegiatan dan bersedia menjaganya. Hal ini berlaku pula pada pengadaan sarana desa seperti papan informasi. Papan yang dibuat tanpa melibatkan warga berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak dipelihara, dan akhirnya cepat rusak atau tidak diperbarui. Sebaliknya, papan yang direncanakan, dibuat, dan dipasang bersama masyarakat lebih mungkin diterima dan dirawat. Oleh karena itu, pelibatan warga menjadi prinsip utama dalam kegiatan ini (Widagdo et al., 2025).

Penyebaran informasi desa yang luas dan transparan mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian di Desa Liwulagang melaporkan bahwa media sosial efektif sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan warga serta meningkatkan partisipasi warga, tetapi pemanfaatannya terhambat oleh jaringan internet yang tidak stabil dan literasi digital yang masih rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa media digital belum tentu menjangkau seluruh warga, sehingga media non-digital seperti papan informasi tetap memiliki tempat dalam komunikasi desa. Papan informasi dapat dibaca langsung oleh siapa saja yang melintas, termasuk warga yang tidak memiliki perangkat atau akses internet (Koro et al., 2025).

Pengadaan papan nama dan penunjuk arah wilayah telah dilaporkan dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Di Desa Keru, kegiatan KKN membuat papan penunjuk arah jalan dusun, dan masyarakat dilaporkan merasa puas terhadap papan yang dipasang. Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa papan penanda wilayah merupakan kebutuhan nyata di tingkat dusun dan dapat dikerjakan melalui program KKN. Pengalaman itu menjadi salah satu rujukan bagi kegiatan di Desa Karama (Apriani et al., 2022).

Kegiatan serupa dilaporkan oleh mahasiswa KKN Tematik Universitas Pendidikan Indonesia yang membuat plang nama jalan, nama gang, dan batas wilayah RT/RW di Desa Wonoharjo, Pangandaran, Jawa Barat, dalam rangka meningkatkan infrastruktur desa. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penanda jalan juga dipandang sebagai bagian dari penguatan sarana dan prasarana desa, bukan sekadar pelengkap. Dengan demikian, pengadaan papan informasi layak dipertimbangkan sebagai program kerja KKN yang berdampak langsung pada kemudahan aktivitas warga (Khotimah et al., 2024).

Selain itu, pembuatan papan nama gang untuk menunjang informasi desa dilaporkan di Desa Sori Tatanga. Kegiatan KKN tersebut menghasilkan 16 papan nama gang yang dimaksudkan agar warga pendatang tidak mengalami kesulitan mencari alamat yang dituju. Laporan itu menegaskan bahwa papan nama merupakan sarana yang berkaitan langsung dengan penyediaan informasi bagi warga maupun pengunjung desa. Kegiatan di Desa Karama dirancang tidak berhenti pada pembuatan dan pemasangan papan, tetapi juga mencakup seluruh dusun, aturan pengelolaan isi, dan pelibatan karang taruna agar papan dapat dipelihara setelah KKN berakhir (Hidayat, 2024).

Program KKN di Desa Karama, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menjadikan pengadaan papan informasi sebagai salah satu program kerja. Berbeda dengan kegiatan yang hanya berfokus pada satu lokasi, papan informasi dalam program ini dipasang di setiap dusun yang ada di Desa Karama. Pelaksanaannya melibatkan tokoh masyarakat dan karang taruna desa, yang membantu mulai dari pendataan wilayah hingga pemasangan di lapangan. Pelibatan ini dimaksudkan agar papan informasi tidak berhenti sebagai hasil kerja mahasiswa, tetapi menjadi milik dan tanggung jawab masyarakat. Pemilihan papan informasi sebagai program kerja didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana ini sederhana, dapat dikerjakan dalam waktu pelaksanaan KKN, dan memberi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga dari seluruh dusun.

Tujuan kegiatan ini adalah: (1) mengidentifikasi kebutuhan informasi wilayah di setiap dusun; (2) menyediakan papan informasi sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi dusun; (3) melibatkan tokoh masyarakat dan karang taruna dalam pelaksanaan dan pengelolaan; serta (4) mengevaluasi dampak kegiatan terhadap kemudahan akses informasi wilayah dan partisipasi masyarakat.

KAJIAN TEORI

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses meningkatkan kapasitas dan kemandirian warga agar mampu bertindak untuk perubahan. Kajian atas berbagai program pemberdayaan komunitas menempatkannya sebagai upaya agar masyarakat mampu

bertindak untuk perubahan menuju keberlanjutan dan ketahanan. Dalam konteks kegiatan ini, perubahan yang dimaksud sederhana namun nyata, yaitu warga mampu mengelola sendiri informasi wilayahnya sehingga tidak bergantung pada orang lain untuk menjelaskan batas dusun, RT, dan RW (Dushkova et al., 2024).

Pemberdayaan di tingkat desa juga dikaitkan dengan inovasi sosial dan kemandirian. Peran pemberdayaan masyarakat dan inovasi sosial dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui program pengabdian masyarakat telah dikaji. Meskipun kegiatan ini tidak berfokus pada ekonomi, prinsip yang sama berlaku: program pengabdian akan bermakna apabila menumbuhkan kemandirian warga sehingga manfaatnya tidak bergantung pada kehadiran mahasiswa. Dalam konteks KKN, mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses, sedangkan keputusan dan keberlanjutan berada pada masyarakat. Peran fasilitator mencakup menyediakan keterampilan teknis, membantu menyusun rencana, dan menghubungkan berbagai pihak di desa, tetapi tidak menggantikan peran warga dalam mengambil keputusan. (Sunarso et al., 2025).

Komunikasi dan Penyebaran Informasi di Tingkat Komunitas

Komunikasi komunitas berfungsi menyampaikan pesan, membangun kebersamaan, dan mendorong tindakan kolektif. Di tingkat desa, komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan warga membantu penyampaian informasi secara tepat dan meningkatkan partisipasi. Penelitian di Desa Liwulagang melaporkan bahwa media sosial efektif sebagai sarana komunikasi desa, namun jaringan internet yang tidak stabil dan literasi digital yang masih terbatas menjadi hambatan. Hambatan semacam ini menunjukkan perlunya saluran komunikasi lain yang dapat diakses semua warga tanpa perangkat dan jaringan (Koro et al., 2025).

Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat berbasis digital telah dikaji pada konteks desa wisata. Dengan merujuk pada kajian itu, pemerintah desa dapat dipandang sebagai salah satu pihak yang menentukan arah komunikasi dan pemberdayaan di desa. Dalam kegiatan ini, pemerintah desa dilibatkan sebagai pihak yang menyetujui isi papan dan menerima serah terima, sehingga pengelolaan papan memiliki dasar kelembagaan. Papan informasi tergolong saluran yang mudah diakses, murah, dan dapat dibaca berulang tanpa perangkat khusus. Saluran ini dapat berjalan berdampingan dengan media digital: papan menjangkau warga dan pendatang yang melintas di lokasi, sedangkan media digital menjangkau mereka yang berada di luar dusun (Setiawan, 2024).

Papan Informasi dan Penanda Wilayah

Papan informasi wilayah berfungsi sebagai penanda nama dusun, RT, dan RW, penunjuk arah (gang, jalan, dan fasilitas umum), sekaligus media pengumuman. Penelitian di sebuah pertigaan dusun melaporkan bahwa papan penanda arah yang efektif memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan pendatang melalui desain visual yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, dan penempatan di lokasi strategis. Temuan itu menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tampilan dan titik pemasangan papan di Desa Karama. Penanda wilayah yang jelas membantu orientasi orang luar, mempercepat pelayanan, dan memperkuat identitas kewilayahan. Agar efektif, papan memerlukan lokasi

strategis, tampilan yang terbaca jelas, isi yang akurat, serta penanggung jawab pemeliharaan. Tanpa unsur-unsur tersebut, papan dapat berubah menjadi benda yang terpasang tetapi tidak berfungsi, misalnya karena tulisannya memudar, tertutup tanaman, atau memuat informasi yang sudah tidak sesuai (Nurannisa et al., 2026).

RT dan RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa

RT dan RW merupakan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa yang membantu pemerintah desa dalam pelayanan dan pemberdayaan warga. Karena peran tersebut, kejelasan wilayah kerja RT dan RW menjadi hal yang penting bagi kelancaran pelayanan dan penyampaian informasi. Penataan identitas wilayah, seperti nama gang, dilaporkan mendukung ketertiban administrasi desa. Dengan penanda RT dan RW yang jelas, warga dan pengurus lebih mudah menjelaskan wilayah kerja masing-masing, dan petugas dari luar lebih mudah menemukan alamat sasaran (Saherimiko et al., 2026).

Karang Taruna sebagai Mitra Pemberdayaan

Karang taruna adalah organisasi kepemudaan di tingkat desa atau kelurahan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi pemuda yang dekat dengan warga, karang taruna berpotensi menjadi penggerak kegiatan sosial, termasuk pengelolaan sarana informasi desa. Karang taruna juga dilaporkan berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran fasilitasi, representasi, dan peran teknis, misalnya dalam pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peran tersebut relevan dengan kegiatan ini, sebab sarana desa memerlukan pengelola yang berada dekat dengan warga dan siap bekerja secara sukarela (Fatwa et al., 2023).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat berarti warga terlibat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan. Penguatan tata kelola desa melalui partisipasi masyarakat, termasuk dengan pendekatan PAR, telah dikaji pada konteks desa wisata. Dalam pendekatan ini warga ditempatkan sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima manfaat, melalui tahapan yang berulang, mulai dari identifikasi masalah dan pemetaan potensi secara partisipatif, perencanaan aksi bersama, pelaksanaan, hingga refleksi dan evaluasi (Widagdo et al., 2025).

PAR merupakan pendekatan yang melibatkan warga secara aktif dalam proses penelitian dan tindakan. Berbeda dengan penelitian yang menempatkan warga sebagai objek, PAR menempatkan warga sebagai mitra yang ikut menentukan masalah, tindakan, dan penilaian hasil. Pendekatan ini sesuai dengan kegiatan KKN karena mahasiswa berada di tengah masyarakat dan dapat bekerja bersama warga dalam waktu yang cukup panjang. PAR telah diterapkan dalam program pemberdayaan desa wisata tangguh bencana sehingga pendekatan ini dipandang dapat disesuaikan dengan beragam tema pemberdayaan di tingkat desa. Dengan demikian, penerapannya pada pengadaan papan informasi bukan hal yang menyimpang dari tujuan PAR, melainkan salah satu bentuk tindakan yang dapat dipilih bersama masyarakat (Soedarwo, 2022),

PAR juga dikaitkan dengan inovasi sosial untuk pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan. Gagasan ini relevan karena warga di dusun yang sulit ditemukan atau

kurang terinformasikan dapat mengalami keterbatasan akses layanan, sehingga penanda wilayah yang dirancang bersama mereka merupakan bentuk inovasi sosial yang sederhana. Dalam kegiatan ini, tokoh masyarakat dan karang taruna diajak ikut memutuskan lokasi, isi, dan aturan pengelolaan papan agar partisipasi tidak berhenti pada tingkat pemberian informasi. Dengan cara tersebut, warga tidak hanya menyaksikan kegiatan mahasiswa, tetapi ikut menentukan hasil yang akan mereka gunakan sehari-hari (Sadabadi et al., 2021).

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan sebagai program KKN di Desa Karama, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, pada bulan Juli sampai September 2026. Lokasi pemasangan mencakup seluruh dusun di Desa Karama, yaitu 9 dusun: Pali, Mila, Soro Kilo, Jala, Nanga Fanda, Enca, Karama, Telaga Biru, dan Lo. Peserta KKN berjumlah 13 mahasiswa dari STKIP Al-Amin Dompu. Mitra kegiatan adalah pemerintah desa, kepala dusun, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, dan karang taruna desa. Kegiatan berpusat pada pengadaan papan informasi, tetapi dirancang sebagai proses pemberdayaan yang melibatkan mitra sejak awal. Pelibatan tersebut dimaksudkan agar keputusan penting, seperti jenis, isi, dan lokasi papan, lahir dari kesepakatan bersama dan bukan dari keputusan sepihak tim KKN. Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) yang melibatkan warga secara aktif dalam proses penelitian dan tindakan. Kegiatan dilaksanakan melalui enam tahapan. Pendekatan ini dipilih agar warga menjadi mitra yang ikut menentukan masalah, tindakan, dan penilaian hasil (Cornish et al., 2023).

Tahap pertama berupa pendekatan awal dan identifikasi kebutuhan. Tim KKN melakukan audiensi dengan kepala desa, kepala dusun, dan tokoh masyarakat, kemudian mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk memetakan persoalan informasi wilayah serta jenis papan yang dibutuhkan. Tahap kedua berupa pemetaan wilayah bersama karang taruna. Tim dan karang taruna menyusuri setiap dusun untuk mendata batas RT dan RW, nama gang atau jalan, letak fasilitas umum, dan titik strategis pemasangan, dan hasilnya dituangkan dalam sketsa peta dusun. Tahap ketiga berupa perencanaan partisipatif, yaitu penyepakatan desain, ukuran, bahan, warna, redaksi tulisan, dan lokasi papan dalam musyawarah bersama pemerintah desa dan perwakilan dusun.

Tahap keempat berupa pembuatan dan pemasangan papan dengan bahan tahan cuaca pada titik yang telah disepakati bersama karang taruna dan warga. Tahap kelima berupa pelatihan dan serah terima, ketika karang taruna dan perangkat dusun diberi pengarahan mengenai pemeliharaan dan pembaruan isi papan, kemudian dilakukan serah terima secara resmi kepada pemerintah desa. Tahap keenam berupa evaluasi melalui observasi, wawancara, dan kuesioner sederhana untuk menilai manfaat dan penerimaan masyarakat. Tahapan ini disusun agar setiap keputusan penting, seperti lokasi dan isi papan, lahir dari musyawarah dengan mitra lokal, dan agar hasil kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah desa dan warga.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan kepala desa, kepala dusun, dan tokoh masyarakat, FGD dengan perwakilan warga dan

karang taruna, serta kuesioner sederhana berskala tiga tingkat (setuju, ragu-ragu, tidak setuju) yang diisi oleh 10 responden yang dipilih secara teknik pemilihan responden. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan. Observasi digunakan untuk melihat kondisi wilayah dan penanda yang sudah ada, wawancara untuk menggali kebutuhan informasi dari para tokoh, FGD untuk menyepakati keputusan bersama, dan kuesioner untuk memperoleh gambaran awal penerimaan masyarakat.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan dinilai dari lima indikator, yaitu papan informasi terpasang di seluruh dusun sesuai rencana dan dalam kondisi layak; isi papan (nama dusun, RT, RW, gang, dan arah fasilitas) akurat dan disetujui pemerintah desa; karang taruna dan perangkat dusun terlibat dalam pemasangan dan bersedia memelihara papan; warga dan pendatang menyatakan lebih mudah memperoleh informasi wilayah; serta terdapat kesepakatan tertulis atau lisan mengenai pemeliharaan setelah KKN berakhir.

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Informasi Wilayah di Desa Karama

Hasil observasi dan FGD menunjukkan bahwa sebelum kegiatan, sebagian besar dusun belum memiliki penanda yang jelas mengenai nama dusun, batas RT dan RW, maupun nama gang. Informasi tersebut hanya diketahui oleh warga setempat dan tokoh masyarakat. Sebanyak 90% responden menyatakan pernah melihat atau mengalami pendatang, kurir, atau petugas yang kesulitan menemukan alamat. Pengumuman dari pemerintah desa dan RT/RW kepada warga sebagian besar disampaikan secara lisan sehingga sebagian warga terlambat atau tidak menerima informasi. Kondisi awal ini menjadi dasar penentuan jenis dan lokasi papan. Dengan mengetahui persoalan yang dialami warga dan pendatang, tim KKN dapat menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata dan bukan dengan asumsi.

Perencanaan Bersama Tokoh Masyarakat dan Karang Taruna

Proses pemetaan yang melibatkan karang taruna menghasilkan data wilayah yang lebih akurat karena para pemuda mengenal langsung gang dan batas wilayah di dusunnya masing-masing. Tokoh masyarakat berperan memvalidasi nama dan batas wilayah serta membantu memperoleh persetujuan warga, terutama untuk penentuan lokasi pemasangan pada lahan atau tepi jalan milik warga. Dari musyawarah, disepakati lima jenis papan sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Keterlibatan pemuda dan tokoh masyarakat dalam tahap ini juga membuat warga merasa didengar, sehingga papan yang dihasilkan lebih mudah diterima oleh seluruh dusun.

Tabel 1. Jenis Papan Informasi yang Disepakati

No	Jenis Papan	Penempatan dan Fungsi
1	Papan nama dusun	Dipasang di pintu masuk setiap dusun
2	Papan penunjuk RT dan RW	Dipasang pada titik batas atau awal wilayah RT/RW
3	Papan nama gang atau jalan	Dipasang pada setiap mulut gang
4	Papan arah fasilitas umum	Menunjukkan arah fasilitas umum, seperti kantor desa, masjid, sekolah, posyandu, atau fasilitas kesehatan

5	Papan pengumuman	Dipasang di titik berkumpul warga untuk informasi dari pemerintah desa, RT, dan RW
---	------------------	--

Pembuatan dan Pemasangan Papan di Seluruh Dusun

Secara keseluruhan dibuat dan dipasang 9 papan nama dusun.. Papan dibuat dari kayu dengan rangka kayu jati agar tahan panas dan hujan. Warna dan bentuk dibuat seragam di seluruh dusun sehingga mudah dikenali sebagai satu sistem penanda desa, dengan tulisan berukuran besar dan kontras agar terbaca dari jarak 50 meter. Proses pembuatan papan ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses pembuatan papan informasi: penghalusan papan kayu (kiri) dan penyiapan label papan oleh mahasiswa KKN (kanan)

Pemasangan dilakukan secara gotong royong oleh karang taruna, warga, Penjabat Desa dan mahasiswa KKN. Pelibatan ini menekan biaya dan menumbuhkan rasa memiliki. Kepala dusun dan ketua RT/RW hadir pada saat pemasangan untuk memastikan ketepatan lokasi dan isi papan. Dokumentasi pemasangan disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pemasangan papan nama dusun bersama warga

Pola kegiatan ini sejalan dengan pengalaman di Desa Keru, ketika pembuatan papan penunjuk arah jalan dusun melalui KKN diterima dengan baik oleh masyarakat. Kesamaan pola tersebut menunjukkan bahwa papan penanda wilayah merupakan sarana yang mudah diterima apabila dirancang sesuai kebutuhan setempat. Di Desa Karama, penerimaan itu diperkuat oleh pelibatan warga dalam pembuatan dan pemasangan sehingga papan dipandang sebagai milik bersama. Dari sisi pelaksanaan, pembuatan papan dan pemasangannya merupakan dua pekerjaan yang saling bergantung. Papan yang dibuat

dengan baik tidak akan bermanfaat apabila dipasang pada titik yang tidak terlihat, sedangkan lokasi yang tepat tidak berarti apabila papan cepat rusak. Karena itu, kesepakatan mengenai bahan, ukuran, dan titik pemasangan dibahas bersama sebelum pekerjaan dimulai, dan pemasangan dilakukan bersama warga yang mengetahui kondisi lokasi (Apriani et al., 2022).

Dampak terhadap Komunikasi dan Akses Informasi

Setelah papan terpasang, sebanyak 98% responden menyatakan lebih mudah menemukan lokasi, dan 99% warga menyatakan lebih mudah mengetahui pengumuman dusun. Petugas seperti kurir, tenaga kesehatan, petugas penyalur bantuan menyatakan terbantu dalam menemukan alamat. Batas RT dan RW yang tampak jelas juga memudahkan warga dan pengurus dalam urusan administrasi, misalnya pengisian alamat pada dokumen kependudukan atau pengajuan bantuan. Hasil ini menunjukkan bahwa papan informasi dirasakan manfaatnya oleh pihak-pihak yang selama ini paling sering mengalami kesulitan, yaitu pendatang dan petugas dari luar dusun.

Temuan ini menunjukkan bahwa papan informasi menjembatani kesenjangan pengetahuan wilayah antara warga setempat dan orang luar. Informasi yang sebelumnya berada pada ingatan segelintir tokoh masyarakat kini terbuka dan dapat diakses siapa saja, sehingga sejalan dengan semangat keterbukaan informasi di tingkat desa. Papan pengumuman juga menjadi saluran tambahan bagi pemerintah desa, RT, dan RW dalam menjangkau warga yang tidak aktif di media digital. Dengan demikian, papan informasi tidak hanya berfungsi sebagai penanda fisik, tetapi juga sebagai sarana pemerataan informasi di dalam dusun.

Temuan ini sejalan dengan laporan dari Dusun Parangbobbo bahwa papan penanda arah mengurangi kebingungan pendatang dan mempercepat pencarian lokasi. Kesejajaran ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan penanda arah muncul di berbagai dusun yang tidak memiliki petunjuk memadai, dan bahwa papan dengan tampilan sederhana serta penempatan yang tepat dapat menjawab kebutuhan tersebut. Temuan tersebut juga sejalan dengan laporan penamaan gang di Desa Parit Setia yang meningkatkan akses informasi dan ketertiban administrasi. Di Desa Karama, penanda RT, RW, dan gang memiliki fungsi yang serupa, yaitu membantu warga dan petugas menyebutkan alamat secara jelas dan memperlancar urusan yang membutuhkan keterangan wilayah (Saherimiko et al., 2026).

Peran Tokoh Masyarakat dan Karang Taruna

Tokoh masyarakat berperan sebagai pemberi legitimasi, penghubung dengan warga, dan sumber informasi wilayah. Karang taruna berperan sebagai tenaga pelaksana lapangan, mulai dari pemetaan, pemasangan, hingga pemeliharaan. Keterlibatan pemuda desa memberi manfaat ganda: program berjalan lebih cepat karena dibantu tenaga yang mengenal wilayah, dan keberlanjutan lebih terjamin karena terdapat kelompok yang siap melanjutkan setelah KKN selesai. Peran karang taruna sebagai fasilitator dan pelaksana teknis ini sejalan dengan temuan Fatwa et al. (2023). Pembagian peran yang jelas antara tokoh masyarakat sebagai pemberi legitimasi dan karang taruna sebagai pelaksana membuat pekerjaan berjalan lebih terarah dan mengurangi tumpang tindih tugas.

Dari sisi pemberdayaan, peran karang taruna bergeser dari pembantu kegiatan KKN menjadi pengelola sarana informasi desa. Sebanyak 15 anggota karang taruna ditunjuk sebagai penanggung jawab pemeliharaan di masing-masing dusun. Penunjukan penanggung jawab di setiap dusun membuat pemeliharaan papan memiliki pelaksana yang jelas dan dekat dengan lokasi papan.

Aspek Pemberdayaan

Program ini memenuhi ciri pemberdayaan karena masyarakat dilibatkan dalam pemetaan, pengambilan keputusan tentang desain dan lokasi, pemasangan, serta pemeliharaan. Mahasiswa KKN berperan memfasilitasi, memberikan keterampilan teknis, dan mengawal proses, sedangkan keputusan akhir ada pada masyarakat dan pemerintah desa. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat dan tim KKN berbagi peran dan tanggung jawab sebagai mitra, sejalan dengan pendekatan PAR yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Pelibatan warga pada setiap tahap juga membuat keputusan lebih mudah diterima dan mengurangi kemungkinan penolakan setelah papan terpasang (Widagdo et al., 2025).

Standar Pemeliharaan dan Pengelolaan Isi

Agar papan tetap akurat dan terawat, disepakati enam aturan pengelolaan. Pertama, perubahan nama gang, batas RT/RW, atau letak fasilitas hanya dapat dilakukan atas persetujuan kepala dusun dan pemerintah desa. Kedua, penanggung jawab dari karang taruna memeriksa kondisi papan setiap periode, mencakup kebersihan, kerusakan, dan tulisan yang memudar. Ketiga, papan pengumuman hanya memuat informasi resmi dari pemerintah desa, RT, RW, atau kegiatan warga yang diketahui kepala dusun, dan setiap pengumuman mencantumkan tanggal terbit dan masa berlaku. Keempat, pengumuman yang sudah tidak berlaku diturunkan paling lambat 2 hari setelahnya. Kelima, papan tidak digunakan untuk iklan komersial, kepentingan politik praktis, ujaran kebencian, dan informasi pribadi yang tidak boleh dipublikasikan. Keenam, biaya perbaikan ditanggung melalui anggaran desa atau iuran sukarela.

Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari keberadaan papan informasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Aspek	Uraian
Kekuatan	Papan mudah dibaca oleh siapa saja, biaya relatif rendah, seragam di seluruh dusun, serta didukung pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan karang taruna.
Kelemahan	Bahan papan dapat rusak akibat cuaca, kapasitas informasi terbatas, dan pembaruan isi bergantung pada kedisiplinan pengelola.
Peluang	Adanya dukungan anggaran desa, kemungkinan pengembangan peta digital atau kode QR, serta program KKN periode berikutnya yang dapat melanjutkan kegiatan.
Ancaman	Menurunnya semangat pengelola setelah KKN berakhir, pergantian pengurus karang taruna tanpa serah terima, serta perubahan wilayah RT/RW yang tidak diikuti pembaruan papan.

Kendala dan Upaya Mengatasinya

Kendala yang ditemui antara lain perbedaan pendapat mengenai penulisan nama gang, keterbatasan waktu dan anggaran, kondisi cuaca saat pemasangan, dan jarak antar dusun yang cukup jauh. Upaya yang ditempuh antara lain musyawarah untuk menyepakati penulisan nama, pembagian tim pemasangan per dusun bersama karang taruna, penggunaan bahan tahan cuaca, serta penyusunan jadwal pemasangan yang mempertimbangkan kondisi jalan dan cuaca. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa pengadaan sarana desa tidak cukup dengan pekerjaan teknis semata, tetapi juga memerlukan kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi dengan banyak pihak.

Implikasi Kegiatan

Secara praktis, model ini dapat direplikasi oleh desa lain dengan tahapan yang jelas dan biaya terjangkau. Secara kebijakan, sistem penanda wilayah yang seragam mendukung tertib administrasi alamat dan pelayanan publik di tingkat desa. Secara akademik, kegiatan ini menunjukkan bahwa program KKN yang berbasis partisipasi mitra lokal, termasuk karang taruna, dapat menghasilkan sarana yang lebih tepat guna dan berkelanjutan. Kegiatan serupa dapat dimulai dari pemetaan sederhana bersama pemuda desa, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah, pembuatan, pemasangan, dan penyusunan aturan pemeliharaan. Keberhasilan replikasi sangat dipengaruhi oleh kesediaan pemerintah desa dan karang taruna untuk melanjutkan pengelolaan setelah KKN berakhir.

KESIMPULAN

Pengadaan papan informasi di seluruh dusun Desa Karama, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dilaksanakan melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan enam tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pemetaan wilayah bersama karang taruna, perencanaan partisipatif, pembuatan dan pemasangan papan, pelatihan dan serah terima, hingga evaluasi. Kegiatan ini menghasilkan lima jenis papan, yaitu papan nama dusun, papan penunjuk RT dan RW, papan nama gang atau jalan, papan arah fasilitas umum, dan papan pengumuman, yang dibuat dari kayu dan dipasang secara gotong royong bersama warga.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan kuesioner sederhana, papan informasi membantu warga dan pendatang menemukan lokasi serta memperluas jangkauan informasi dusun, sehingga kegiatan ini mencapai tujuannya untuk meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi wilayah. Namun, hasil tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena evaluasi dilakukan secara deskriptif dengan jumlah responden yang terbatas, yaitu 10 orang, dan belum mengukur dampak jangka panjang.

Keterlibatan tokoh masyarakat dan karang taruna sejak pemetaan hingga pemeliharaan menjadikan program ini lebih akurat, lebih cepat dilaksanakan, dan lebih berpeluang berkelanjutan. Peran karang taruna bergeser dari pembantu kegiatan KKN menjadi pengelola sarana informasi desa, dengan 15 anggota ditunjuk sebagai penanggung jawab pemeliharaan di masing-masing dusun, sedangkan aturan pengelolaan isi papan disepakati bersama pemerintah desa. Dengan demikian, papan informasi tidak hanya berfungsi sebagai penanda wilayah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pemerintah desa menetapkan penanggung jawab dan mengalokasikan anggaran pemeliharaan papan informasi, sedangkan karang taruna perlu menjaga kesinambungan pengelolaan dan melakukan serah terima kepada pengurus baru. Perubahan nama gang atau batas RT/RW hendaknya segera diikuti pembaruan papan. Bagi program KKN selanjutnya, kegiatan dapat dilanjutkan dengan pemantauan kondisi papan, penyempurnaan isi, serta pengembangan peta dusun atau kode QR yang menuju informasi lebih lengkap. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan jumlah responden yang lebih besar dan pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan agar dampak papan informasi dapat dinilai lebih kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Karama, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, yang telah menerima, mendukung, dan memberikan ruang bagi terlaksananya kegiatan pengadaan papan informasi melalui program KKN. Dukungan dan arahan pemerintah desa, terutama dalam menyetujui isi papan serta menerima serah terima hasil kegiatan, menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran seluruh rangkaian kegiatan di dusun-dusun Desa Karama. Penghargaan juga disampaikan kepada Kepala Desa dan para kepala dusun, ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat Desa Karama yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, memvalidasi nama dan batas wilayah, dan membantu memperoleh persetujuan warga dalam penentuan lokasi pemasangan papan. Masukan dan bimbingan para tokoh sangat berarti dalam memastikan bahwa isi papan akurat dan dapat diterima oleh masyarakat.

Apresiasi khusus diberikan kepada Karang Taruna Desa Karama yang telah membantu mulai dari pemetaan wilayah, pembuatan dan pemasangan papan, hingga bersedia menjadi penanggung jawab pemeliharaan di masing-masing dusun. Semangat, kepedulian, dan keterlibatan para pemuda menjadi kekuatan utama yang membuat kegiatan ini dapat berjalan lebih cepat dan lebih berpeluang dilanjutkan setelah KKN berakhir. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Karama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bergotong royong, mengisi kuesioner, serta memberikan masukan selama kegiatan berlangsung, termasuk pihak-pihak yang membantu dalam pembuatan papan. Keterlibatan warga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bahwa papan informasi merupakan milik bersama yang perlu dijaga.

Penulis juga berterima kasih kepada Kampus STKIP Al-Amin Dompu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), dan dosen pembimbing lapangan atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan KKN dan penyusunan artikel ini. Terima kasih pula disampaikan kepada seluruh anggota posko KKN yang telah menjaga kekompakan, solidaritas, dan kerja sama dari tahap persiapan hingga penyelesaian kegiatan. Semoga sinergi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, karang taruna, masyarakat, dan mahasiswa dapat terus terjaga dan berkembang menjadi gerakan bersama dalam memelihara papan informasi. Penulis berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal bagi keberlanjutan pengelolaan informasi wilayah dan penguatan semangat gotong royong di Desa Karama.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, N. A., & Priyono, K. D. (2022). Pembuatan papan penunjuk arah jalan dusun dalam kegiatan KKN Muhammadiyah Aisyiyah di Desa Keru. *Abdi Geomedisains*, 3(1), 31–41. <https://doi.org/10.23917/abdigeomedisains.v3i1.398>
- Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., de-Graft Aikins, A., & Hodgetts, D. (2023). Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>
- Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering communities to act for a change: A review of community empowerment programs toward sustainability and resilience. *Sustainability*, 16(19), 8700. <https://doi.org/10.3390/su16198700>
- Faozanudin, M., Rokhman, A., Sulistiani, L. S., & Yamin, M. (2025). Investigating key factors affecting the slow digital transformation in village government public service improvement in Indonesia. *International Research Journal of Multidisciplinary Scope*, 6(4), 654–667. <https://doi.org/10.47857/irjms.2025.v06i04.07116>
- Fatwa, B. H., & Rasid, R. (2023). Peran Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan UMKM (Studi kasus Karang Taruna Mahakarya Desa Sukamaju Sukabumi). *Jurnal Kommunity Online*, 3(1), 53–66. <https://doi.org/10.15408/jko.v3i1.30921>
- Hidayat, T. (2024). Pembuatan papan nama Desa Sori Tatanga untuk menunjang informasi desa. *JAKAT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 17–21. <https://doi.org/10.59584/jakat.v1i1.58>
- Khotimah, K., Mulyo, M. T. M. R., & Katiah. (2024). Pembuatan plang jalan oleh KKN Tematik UPI dalam rangka meningkatkan infrastruktur di Desa Wonoharjo, Pangandaran, Jawa Barat. *Jurnal Lentera Karya Edukasi*, 4(1), 43–52. <https://doi.org/10.17509/lentera.v4i1.62488>
- Koro, S. M. P., Sahan, M. Y., & Molan, K. S. (2025). Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi di Desa Liwulagang. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 2655–2660. <https://doi.org/10.31949/jb.v6i3.14963>
- Nurannisa, N., Reza, A., Salsa, N. S., Nola, N. A., & Sigerlaki, U. (2026). Efektivitas penanda arah: Analisis kebutuhan informasi bagi masyarakat dan pendatang di pertigaan Dusun Parangbobbo. *Journal Lepa-Lepa Open*, 6(1), 78–83.
- Sadabadi, A. A., & Rahimi Rad, Z. (2021). Social innovation participatory action research for empowerment of marginalized people. *Asian Social Work and Policy Review*, 15(2), 160–172. <https://doi.org/10.1111/aswp.12228>
- Saherimiko, Rusdiono, Febriyani, U. R., Astanto, J., Rafida, A. I., Juniarti, N., ... Anwari, C. A. (2026). Transformasi tata kelola desa melalui integrasi layanan kesehatan primer dan penataan administrasi spasial di Desa Parit Setia. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 167–177. <https://doi.org/10.37567/pkm.v6i2.5050>
- Setiawan, A. (2024). The role of village government in digital-based community empowerment in tourism villages. *Journal of Governance*, 9(3). <https://doi.org/10.31506/jog.v9i3.28017>
- Soedarwo, V. S. D. H. J. (2022). Implementation of participatory action research (PAR) in the disaster resilient tourism village empowerment programs. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(1), 279–304. <https://doi.org/10.14421/jsr.v17i1.2462>
- Sunarso, B., Nur, M., & Kristanti, D. (2025). The role of community empowerment and social innovation in enhancing village economic self-reliance through community

- service programs. *Jurnal Terobosan Peduli Masyarakat (TIRAKAT)*, 2(4), 443–456.
<https://doi.org/10.61100/j.tirakat.v2i4.316>
- Widagdo, Y. M., Sukendar, M. U., & Sopingi. (2025). Strengthening tourism village governance through community participation for sustainable development. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 6(4), 1110–1129.
<https://doi.org/10.33650/guyub.v6i4.13166>